

Koalisi Presidensial Pasca-Angket Century

Mohammad Fajrul Falaakh

Penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan penyalangan Bank Century membuktikan berfungsinya pengawasan DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pemerintah. Mayoritas anggota DPR (60 persen) menyatakan bahwa penyalangan Bank Century bermasalah. Sejumlah pejabat harus diminta pertanggungjawabannya. Kemampuan DPR dalam *checks and balances* ini digerakkan oleh hubungan taktis antara PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Hanura bekerja sama dengan Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan (tiga partai terakhir bergeser dari peran koalisi).

Secara umum, tindak lanjut hasil pengawasan parlemen itu masih merupakan tanda tanya, baik di ranah penegakan hukum oleh kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi maupun peluang kecil peradilan konstitusi untuk memakzulkan Wakil Presiden Boediono. Namun terbukti kekuatan koalisi bukan bersandar pada kedudukan Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilihan Umum 2009 atau jatah kursi menteri bagi pendukung koalisi kepresidenan.

Kekuatan koalisi harus tunduk kepada faktor konstitusional berupa fungsi parlemen dalam mengawasi pemerintah. Fungsi politik konstitusional ini sudah dicoba dikendalikan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu melalui koalisi Cikeas menjelang pemilihan presiden 2009. Koalisi diwujudkan melalui pembagian kursi di kabinet, lembaga nondepartemen (LPND), lembaga-lembaga negara (seperti Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Pertimbangan Presiden), maupun di berbagai badan usaha milik negara.

Jelas energi kelompok oposisi plus berhasil memanfaatkan fungsi pengawasan DPR sehingga menggeser keseimbangan koalisi pemerintah yang telah dibangun oleh SBY dan Partai Demokrat. Potensi pergeseran koalisi itu selalu terbuka karena koalisi kepresidenan didukung oleh kekuatan partai-partai yang terfragmentasi. Dapat dimengerti, Partai Demokrat menggulirkan wacana kocok ulang kabinet pasca-angket DPR dan berusaha menarik PDI Perjuangan untuk mengukuhkan koalisi untuk memerintah.

Menanggapi hasil angket DPR itu, SBY menyatakan perhatian utamanya adalah menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas dan bukan terfokus pada koalisi. Baginya, koalisi adalah cara menciptakan stabilitas sistem presidensial untuk melaksanakan kebijakan dimaksud. SBY cukup berhati-hati dan tampaknya menyadari bahwa kocok ulang kabinet belum tentu merupakan cara yang tepat untuk "menghukum" mitra koalisi yang memilih menjalankan fungsi pengawasan parlemen terhadap pemerintah.

Kocok ulang kabinet dapat menyudutkan SBY di seberang tata kelola pemerintahan yang baik. Mungkin cara itu dapat mengguncang stabilitas pemerintah. tampaknya kocok ulang kabinet akan menjadi pilihan kalau dukungan terhadap koalisi dapat diperoleh dari PDI Perjuangan. Berbagai tawaran jabatan konon berseliweran ke PDIP. Namun terbukti tak mudah mengubah sikap PDIP.

Pidato Megawati Soekarnoputri pada pembukaan Kongres III PDIP di Denpasar (6 April) menegaskan sikapnya untuk tidak tergiur oleh pragmatisme politik dengan pertimbangan untung-rugi berkoalisi atau berposisi.

Pidato Megawati menunjukkan kepercayaan yang jelas, dukungan rakyat pemilih hanya dapat diraih kembali kalau partai berpihak kepada mereka. Ia menilai kemerosotan perolehan suara PDIP dalam dua pemilu terakhir merupakan teguran rakyat. PDIP meraih 33 persen suara pada Pemilu 1999, namun menyusut ke 18 persen pada Pemilu 2004 dan 14 persen pada Pemilu 2009.

Di balik pernyataan itu, PDIP sudah mengangankan pemilu dan pemilihan presiden pada 2014. Karena Undang-Undang Dasar 1945 membatasi masa jabatan presiden selama dua periode, berarti faktor SBY bagi Partai Demokrat tidak lagi setinggi pada Pemilu 2009. Popularitas SBY mendongkrak perolehan suara Partai Demokrat dari 7,5 persen pada Pemilu 2004 menjadi 21 persen pada Pemilu 2009 (naik hampir 300 persen). Menuju pemilu dan pemilihan presiden 2014, semua partai dan tokoh politik harus meningkatkan kinerjanya sendiri. Di sinilah tradisi politik yang lebih mapan dari PDIP akan ikut berpengaruh dalam berhadapan dengan pendatang baru seperti Partai Demokrat.

Kukuhkan PDIP menjadi penjuror bagi kekuatan oposisi plus? Stabilkan pemerintah SBY-Boediono bersandar pada kekuatan Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa di DPR? Leluasa pulakah Partai Golkar, PKS, dan PPP bermanuver dalam skema koalisi-oposisi? Pertanyaan-pertanyaan ini tak mudah dijawab. Mungkin sesulit pilihan SBY untuk "menghukum" mitra koalisi yang ikut melahirkan mosi DPR tentang kebijakan penyalangan Bank Century.

Tentu, para politikus tak akan kehilangan isu untuk digulirkan. Setidak-tidaknya kelompok oposisi plus sudah mematok agenda pemantauan tindak lanjut hak angket DPR tentang penyalangan Bank Century. Pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dengan Menteri Keuangan mulai menunjukkan sikap kritis DPR, karena hasil Panitia Khusus Angket DPR mendesak pemerintah memasukkan skema pemulihan aset yang terpakai dalam penyalangan Bank Century ke RAPBN paling lambat pada 2011. Kelambanan aparat penegak hukum menindaklanjuti rekomendasi DPR itu juga telah ditanggapi oleh para inisiator angket untuk mendorong penggunaan hak DPR menyatakan pendapat dalam rangka pemakzulan wakil presiden (mosi pemakzulan Wapres Boediono).

Institusi penegak hukum tak boleh berhenti hanya membekukan aset para pemilik saham Bank Century (Robert Tantular, Rifat A. Rizvi, dan Hesham al-Warraaq) tanpa bergegas menuntaskan kasus para petinggi Bank Indonesia yang ikut bertanggung jawab melahirkan skandal Bank Century. Keterpurukan citra SBY karena skandal Bank Century tak cukup dipulihkan hanya dengan menggulirkan pendekatan *ad hoc* dan kasuistik dalam memberantas mafia hukum. Semakin lamban proses penegakan hukum atas pelaku skandal Bank Century, yang pada dasarnya menjadi wewenang institusi-institusi eksekutif, risiko politik yang tidak menguntungkan akan semakin terbuka. Risiko ini harus dihadapi oleh pemerintah SBY, Partai Demokrat, dan mitra koalisinya.

Penggunaan hak angket DPR menunjukkan dinamika koalisi presidensial dan pengaruhnya terhadap stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Di panggung politik yang tampak cair itulah *presidential leadership* ditantang, pilihan kebijakan pemerintah ditimbang untuk diputuskan, dan lingkungan politik yang kondusif disemaikan. (Sumber: Koran Tempo, 15/4/2010)